1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   a. Pada bulan Januari 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi Month to Month (MtM) sebesar 0,33% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,19. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 0,33% sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 2,88%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Januari 2026, antara lain emas perhiasan, bawang putih, pindang asin, pepaya, beras, dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2026, antara lain tarif listrik, emas perhiasan, tomat, kelapa, daging ayam ras, dan kopi bubuk.

   b. Pada bulan Februari 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi Month to Month (MtM) sebesar 0,91% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,20. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 0,57%, sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 4,69%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Februari 2026, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, sewa rumah, telur ayam ras, dan bawang merah. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Februari 2026, antara lain tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, tomat, bawang merah, dan telur ayam ras.

   c. Pada bulan Maret 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi Month to Month (MtM) sebesar 0,65% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,93. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 1,23%, sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 4,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Maret 2026, antara lain daging ayam ras, tomat, ayam hidup, jeruk, jagung manis, dan anggur. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2026, antara lain tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, tomat, telur ayam ras, dan sewa rumah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Bulan Januari 2026:

   1. Harga emas perhiasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti permintaan dari industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan. emas.
   2. Pada bulan Januari terdapat panen beberapa komoditas holtikultura, seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, serta tomat sehingga stok melimpah dan menyebabkan harga di level konsumen mengalami penurunan.

   Bulan Februari 2026:

   1. Kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh stok terbatas, adanya program makan bergizi gratis dan permintaan meningkat jelang bulan Ramadhan.
   2. Kebijakan turunnya harga BBM mulai diberlakukan pada 1 Februari 2026 dan mencakup produk dalam kategori Pertamax Series serta Dex Series. Penyesuaian harga BBM mempertimbangkan perkembangan harga rata-rata minyak dunia yang dipublikasikan lembaga internasional, seperti Argus atau Mean of Platts Singapore (MOPS), serta

pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3. Pada Januari-Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga PT. PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. PT. PLN (Persero) mendukung penuh keputusan Pemerintah melalui Kementerian ESDM yang menetapkan tarif listrik pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026 tidak mengalami kenaikan.

Bulan Maret 2026:

1. Kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh stok terbatas dan permintaan meningkat di bulan Ramadhan dan Pasca Lebaran. Dari sisi permintaan, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi daging ayam untuk kebutuhan berbuka puasa, sahur serta kegiatan sosial seperti pembagian makanan dan persiapan hidangan hari raya. Selain itu, pelaku usaha kuliner juga meningkatkan pembelian bahan baku untuk memenuhi kebijakan permintaan.
2. Pada Februari 2026, harga cabai rawit di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan tajam akibat peningkatan permintaan menjelang Ramadhan, sedangkan pada Maret 2026 harga cenderung berfluktuasi dengan sedikit koreksi namun tetap berada pada level tinggi karena permintaan selama Ramadhan masih kuat meskipun pasokan mulai membaik. Meningkatnya pasokan cabai rawit (produksi lokal maupun kiriman dari luar wilayah) mendorong penurunan harga komoditas cabai pada akhir bulan Maret 2026.
3. Harga emas global sempat tinggi pada awal Maret, namun mengalami penurunan pada pertengahan maret dan menurun tajam pada akhir maret. Hal ini disebabkan adanya kebijakan suku bunga, geopolitik di Timur Tengah, serta adanya volatilitas pasar global. Dampak dari hal ini adalah turut menurunnya harga emas perhiasan di Indonesia mengikuti perkembangan harga emas global.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok, telah dilaksanakan 13 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta 13 kali Operasi Pasar Murah (OPM) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkopum). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada berbagai wilayah strategis untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
2. Sebagai upaya meningkatkan produksi hortikultura sekaligus mendukung pengendalian inflasi dari sisi pasokan, telah dilakukan penyaluran bantuan bibit tanaman sayuran berupa cabai rawit, cabai keriting, dan tomat kepada masyarakat di Desa Jeru Kecamatan Sumberrejo, Desa Sumbang Kecamatan Bojonegoro, dan Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu. Penyaluran bibit dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing pemerintah desa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan budidaya hortikultura masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan melanjutkan pelaksanaan Program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) dengan sasaran sebanyak 4.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi telur, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan ayam petelur.

Untuk mendukung keterjangkauan harga pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) turut menyediakan pasokan telur pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dengan harga Rp25.000 per kilogram. Pada setiap pelaksanaan kegiatan, rata-rata penjualan telur mencapai 150 kilogram, yang menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap komoditas tersebut.

5. Dalam mendukung keberlanjutan Program Gayatri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat berperan sebagai offtaker, sehingga mampu membantu peternak dalam pemasaran hasil produksi telur secara berkelanjutan dan memberikan kepastian pasar bagi para peternak.
6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, kualitas produk, serta daya saing industri lokal yang pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah.
7. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan 9 titik embung di berbagai wilayah kecamatan. Keberadaan embung diharapkan dapat mendukung irigasi lahan pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko gagal panen akibat keterbatasan air.
8. Disnakkan juga melaksanakan Program Domba Kesejahteraan dengan sasaran sebanyak 3.325 KPM pada tahun 2026. Program ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga.
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan Program Pelatihan Pekarangan Mekar Ayu yang menargetkan 1.800 warga kurang mampu. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, disiapkan sebanyak 65.000 bibit sayuran berkualitas untuk didistribusikan kepada Kelompok Tani (Poktan) sebagai stimulan awal. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
10. Dinas Peternakan dan Perikanan terus mengembangkan Program Kolega (Kolam Lele Keluarga) sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2026, program ini direncanakan menyasar 335 KPM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sumber protein masyarakat sekaligus menambah pendapatan keluarga penerima manfaat.
11. Pemkab Bojonegoro telah mengantisipasi adanya prakiraan musim kemarau panjang. Langkah itu diambil lewat surat edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bernomor 520/531/412.221/2026 per 16 Maret 2026, tentang Antisipasi dan Mitigasi Musim Kemarau 2026 bagi sektor pertanian di wilayahnya. Kondisi musim kemarau di Provinsi Jatim termasuk Kabupaten Bojonegoro, diperkirakan bersifat bawah normal atau lebih kering dari biasanya dengan durasi lebih panjang.
12. Sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan kesejahteraan petani di kawasan sekitar hutan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali melaksanakan program bantuan bibit buah-buahan. Pada tahun 2026, bantuan difokuskan pada bibit alpukat dan jambu mete yang akan disalurkan kepada Kelompok Tani (Poktan). Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan, mendiversifikasi komoditas pertanian, serta memberikan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    4.

Secara umum kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik melalui sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait. Berbagai upaya yang dilakukan telah mampu menjaga keterjangkauan harga, memperkuat ketersediaan pasokan, meningkatkan produksi pangan, serta mendukung stabilitas distribusi komoditas strategis. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) secara rutin terbukti memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang bulan Ramadhan ketika permintaan masyarakat meningkat. Intervensi tersebut turut membantu meredam gejolak harga beberapa komoditas pangan strategis.

Dari sisi ketersediaan pasokan, berbagai program peningkatan produksi seperti penyaluran bibit hortikultura, Program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri), Program Kolega (Kolam Lele Keluarga), Program Domba Kesejahteraan, bantuan bibit buah-buahan, serta pembangunan embung merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung pengendalian inflasi dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, pembinaan BUMDes sebagai offtaker Program Gayatri diharapkan mampu menciptakan rantai pemasaran yang lebih efisien sehingga memberikan kepastian pasar bagi peternak.

Meskipun demikian, pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026 masih menghadapi tantangan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun musiman. Peningkatan permintaan menjelang Ramadhan dan Idulfitri menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan, terutama daging. ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Di sisi lain, harga emas perhiasan masih dipengaruhi oleh dinamika pasar global, fluktuasi nilai tukar, serta kondisi geopolitik internasional sehingga berada di luar kendali pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan nasional terkait tarif listrik juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan inflasi tahunan (year-on-year).

Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara lebih intensif, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan periode yang berpotensi memicu kenaikan inflasi. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah perlu terus dioptimalkan pada wilayah yang mengalami tekanan harga, disertai penguatan produksi pangan lokal, kelancaran distribusi, serta pemberdayaan masyarakat melalui program-program ketahanan pangan yang telah berjalan. Dengan langkah tersebut, diharapkan stabilitas harga dapat terus terjaga, daya beli masyarakat tetap terpelihara, dan target pengendalian inflasi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 dapat tercapai.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Melanjutkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) secara berkelanjutan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada wilayah yang mengalami kenaikan harga komoditas strategis.
    2. Meningkatkan pemantauan harga, stok, dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok secara berkala melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pasokan maupun gejolak harga.
    3. Memperkuat upaya peningkatan produksi pangan melalui optimalisasi program budidaya hortikultura, pengembangan peternakan, pembangunan infrastruktur pendukung

pertanian, serta pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga guna menjaga ketersediaan pasokan dalam jangka menengah dan panjang.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti Gayatri, Kolega, Domba Kesejahteraan, dan Pekarangan Mekar Ayu, agar mampu meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Memperkuat peran BUMDes sebagai offtaker hasil produksi peternakan dan pertanian untuk memperpendek rantai distribusi, memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak, serta menjaga stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen.
6. Meningkatkan koordinasi dan pertukaran data antar anggota TPID melalui pemantauan harga dan pasokan secara real time sebagai dasar penyusunan langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan inflasi.
7. Melakukan pemetaan wilayah dan komoditas yang berpotensi mengalami tekanan inflasi sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, baik melalui distribusi pangan, bantuan sarana produksi, maupun operasi pasar.
8. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai diversifikasi konsumsi pangan, pemanfaatan pekarangan, serta pola belanja yang bijak guna mendukung stabilitas permintaan dan memperkuat ketahanan pangan keluarga.
9. Melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bulog, dan instansi vertikal dalam mengantisipasi dampak faktor eksternal, seperti perubahan harga komoditas global, fluktuasi nilai tukar, maupun kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap inflasi daerah.
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas seluruh program pengendalian inflasi melalui indikator keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K), sehingga kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.